

**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA MODAL PERALATAN**  
**DAN MESIN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN X TAHUN ANGGARAN 2023**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**DIAJUKAN OLEH:**  
**NAMA : AZWAR ARIFIN BINTANG**  
**NIM : 126232118**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**  
**2024**

**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA MODAL PERALATAN**  
**DAN MESIN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN X TAHUN ANGGARAN 2023**

**LAPORAN AKHIR DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK KELULUSAN PADA PADA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**



**DIAJUKAN OLEH:**  
**NAMA : AZWAR ARIFIN BINTANG**  
**NIM : 126232118**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**  
**2024**

**ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA MODAL PERALATAN  
DAN MESIN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN X TAHUN ANGGARAN 2023**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun oleh :**



Azwar Arifin Bintang

**126231118**

**Disetujui Oleh : Pembimbing**



Widya Sari, SE., M.Si, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA

**ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA MODAL PERALATAN  
DAN MESIN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN X TAHUN ANGGARAN 2023**

**AZWAR ARIFIN BINTANG**

**126232118**

***ABSTRACT***

*In the management of local government finances, it is expected to produce reliable financial reports, especially in the management of capital expenditures, which include expenditures for equipment and machinery. This spending plays a crucial role in infrastructure development and improving public services, but it is vulnerable to misuse, particularly in procurement projects with large transaction values. The complexity of technical specifications and the lack of transparency in procurement information create opportunities for corrupt practices. The aim of this research is to analyze the audit procedures conducted by the Audit Board of Indonesia on capital expenditure accounts for equipment and machinery to ensure the quality of financial reports that are accountable and transparent, to prevent misuse, and to ensure compliance. The research findings indicate that there are nine procedures carried out to examine capital expenditures for equipment and machinery. During the implementation of these procedures, issues were found in the execution of capital expenditures for equipment and machinery, specifically regarding the non-compliance of item specifications.*

**Keywords:** *Financial Report of Regional Government, Capital Expenditures for Equipment and Machinery, Audit Procedure*

**ABSTRAK**

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal terutama pengelolaan belanja modal yang termasuk didalamnya belanja modal peralatan dan mesin. Belanja ini berperan penting dalam pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik, tetapi rentan terhadap penyalahgunaan, terutama dalam proyek pengadaan dengan nilai transaksi yang besar. Banyaknya kompleksitas dalam spesifikasi teknis dan kurangnya transparansi informasi pengadaan menjadi celah bagi tindakan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas akun belanja modal peralatan dan mesin guna memastikan kualitas laporan keuangan yang akuntabel dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sembilan prosedur yang dilakukan untuk memeriksa belanja modal peralatan dan mesin. Dari pelaksanaan prosedur tersebut ditemukan masalah dalam pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin yaitu ketidaksesuaian spesifikasi barang.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Prosedur Pemeriksaan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“Analisis Prosedur Pemeriksaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023”**.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widioatmojo, SE., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, SE., M.Si., Ak., CPI., CA., CPA selaku Ketua Program Studi Program Pendidikan Akuntan.
4. Ibu Widyasari, SE., M.Si, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA selaku Dosen Pembimbing atas waktu, bimbingan, masukan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan laporan akhir.
5. Bapak Dr. Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA serta seluruh rekan-rekan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan dan masukan dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
6. Seluruh dosen dan pegawai Universitas Tarumanagara atas dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan.
7. Seluruh keluarga dan teman-teman atas doa serta dukungan yang tulus dan tiada henti untuk memotivasi penulis selama masa perkuliahan hingga laporan akhir ini selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan akhir ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis. Namun demikian laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Jakarta, Desember 2024

Azwar Arifin Bintang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Formulasi Masalah .....	3
1.3.    Ruang Lingkup .....	4
1.4.    Tujuan Penelitian .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>5</b>
2.1.    Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah .....	5
2.2.    Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	6
2.3.    Prosedur Pemeriksaan .....	8
2.4.    Temuan Pemeriksaan .....	10
2.5.    Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>14</b>
3.1.    Objek Penelitian .....	14
3.2.    Teknik Pengumpulan Data .....	14
3.3.    Teknik Analisis Data .....	15
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>16</b>
4.1.    Prosedur Pemeriksaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	16
4.2.    Temuan Pemeriksaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	21
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>25</b>
5.1.    Kesimpulan .....	25
5.2.    Saran .....	25
<b>REFERENSI .....</b>	<b>26</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perbedaan Spesifikasi Belanja Peralatan Mesin ..... 22

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan harus mempertimbangkan dan memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerahnya berfokus pada hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah dan potensi daerah serta memegang peranan yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan salah satu contoh dari belanja negara yang rutin. Belanja modal peralatan mesin memiliki peran yang vital dalam pembangunan daerah khususnya dalam meningkatkan fasilitas penunjang layanan publik. Beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur daerah akan terus berjalan seiring dengan pertumbuhan output ekonominya (Pratiwi dan Malik, 2023 : 25). Dengan jumlah investasi dan proporsi belanja yang tepat terhadap peralatan dan mesin, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah. Belanja modal peralatan dan mesin merupakan salah satu belanja yang memiliki risiko yang tinggi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan sebab proyek pengadaan tersebut melibatkan nilai transaksi yang cukup besar. Hal ini membuat proyek tersebut menjadi target utama bagi pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan korupsi ataupun penggelapan sebab spesifikasi teknis peralatan dan mesin yang seringkali sangat kompleks dan sulit dipahami oleh orang awam.

Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi spesifikasi atau menaikkan harga. Informasi yang disajikan pada proses pengadaan pada pemerintah daerah juga seringkali kurang transparan, membuatnya sulit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Disisi lain, informasi dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa karakteristik kualitatif tersebut terpenuhi, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”. Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Pemeriksaan tersebut juga merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap uang yang digunakan untuk belanja modal khususnya belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh pemerintah daerah benar-benar di pergunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan seluruh proses pengadaan tersebut, mulai dari perencanaan, penganggaran, tender, hingga pelaksanaan, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna memastikan bahwa spesifikasi teknis peralatan dan mesin yang dibeli telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan Standar

Pemeriksaan maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara.

Dalam melakukan pemeriksaan, kualitas laporan hasil pemeriksaan merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap pemeriksa pemeriksa. Laporan yang berkualitas tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus memberikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diandalkan bagi pengambil keputusan. Untuk mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas pemeriksa harus merancang dan merencanakan serta melaksanakan prosedur pengujian secara cermat untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan, dan jika dalam pelaksanaan prosedur pengujian terdapat indikasi permasalahan maka hal itu yang disusun menjadi temuan pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan yang diterapkan oleh pemeriksa tersebut guna membuktikan dan memastikan bahwa telah atau akan terjadi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebuah temuan atau sekelompok temuan pemeriksaan disebut lengkap sepanjang tujuan pemeriksannya telah dipenuhi dan laporannya secara jelas mengaitkan tujuan tersebut dengan unsur temuan pemeriksaan berdasarkan prosedur pemeriksaan yang digunakan. Oleh karena itu, maka penulis mengajukan penelitian mengenai **“Prosedur Pemeriksaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023”**.

## 1.2. Formulasi Masalah

Prosedur pemeriksaan keuangan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam menilai kualitas dan menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, hal ini seiring dengan laporan hasil pemeriksaan yang kerap mengungkap ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kelemahan sistem pengendalian internal, seperti temuan terkait belanja modal peralatan dan mesin yang tidak sesuai spesifikasi, menunjukkan pentingnya prosedur pemeriksaan yang efektif. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan

sebelumnya penulis ingin menganalisis secara mendalam bagaimana prosedur pemeriksaan belanja modal peralatan dan mesin dalam merumuskan terjadinya penyimpangan. Berikut rincian rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana prosedur pemeriksaan belanja modal peralatan dan mesin yang dilaksanakan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023?
- 2) Apa hasil dari pelaksanaan prosedur pemeriksaan belanja modal peralatan dan mesin yang dilaksanakan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023?

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada prosedur pemeriksaan belanja modal peralatan dan mesin pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023. Keterbatasan data yang dapat ditampilkan mengikuti kebijakan untuk tetap menjaga redaksi maupun nama tetap *confidential*.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Dari pokok permasalahan yang telah di uraikan tersebut, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

- 1) Menjelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023.
- 2) Menjelaskan apa hasil yang di peroleh dari pelaksanaan prosedur pemeriksaan belanja modal peralatan dan mesin pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023.

## REFERENSI

- Badiklat PKN BPK RI. (2022). *Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Diklat JFPAP*. Jakarta: Badiklat PKN BPK RI.
- Badiklat PKN BPK RI. (2022). *SPKN untuk Diklat JFPAP*. Jakarta: Badiklat PKN BPK RI.
- Badiklat PKN BPK RI. (2022). *Teknis Penulisan Temuan Pemeriksaan*. Jakarta: Badiklat PKN BPK RI.
- Lomboan, M. H, Tinangon, J, & Panitik, S (2022). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Universitas Sam Ratulangi*
- Pratiwi, W.O.R.S, & Malik, E (2023). Analisis Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Buton*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung:Alfabeta
- Widiyanti, W. (2022). Prosedur Pemeriksaan Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota X Tahun Anggaran 2021. *Jurnal Universitas Tarumanagara*.